

BAB V

KESIMPUNAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi strategi pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan selama 2016-2018 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diarahkan dalam RIPPARPROV Sumsel 2015-2025, sudah menjalankan program yaitu 'pengembangan destinasi pariwisata dengan mengembangkan fasilitas pada aset yang dimiliki oleh provinsi yaitu Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Bukit Siguntang dan Museum Balaputera Dewa'.
2. Anggaran yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan untuk program pengembangan destinasi pariwisata melalui pengembangan aset/daya tarik wisata milik provinsi (Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Bukit Siguntang), selama 2016-2018 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan perbantuan dari pihak terkait seperti Dinas Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
3. Prosedur yang digunakan untuk pengembangan destinasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yaitu menerima usulan dari masing-masing pengelola destinasi yang ada di Sumatera Selatan. Pengembangan aset milik provinsi secara langsung dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan untuk destinasi yang ada di kabupaten/kota harus melalui mekanisme untuk mendapat bantuan pembangunan fisik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Hal ini juga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2015.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai data untuk destinasi pariwisata berkelanjutan di Sumatera

Selatan. Akan tetapi untuk aset milik provinsi yang dikembangkan sudah memenuhi beberapa dimensi pariwisata berkelanjutan seperti dimensi lingkungan.

5. Tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan adalah mengenai perbedaan antara perumusan strategi dengan pelaksanaannya. Sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu hambatan pelaku, hambatan manajemen, dan hambatan sumber daya.

5.2 Saran

Setelah memberikan gambaran mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil tahapan analisis dan pembahasan, selanjutnya peneliti akan memberikan saran kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi.

Saran-saran tersebut adalah:

1. Keterbatasan anggaran yang digunakan melalui APBD dan DAK serta dana perbantuan khusus, sebaiknya dialokasikan lebih besar agar lebih optimal dalam melakukan pembangunan yang direncanakan.
2. Prosedur yang digunakan harusnya dibuat lebih rinci dan jelas agar mudah dipahami oleh pengelola ataupun masyarakat disekitar destinasi yang berada di Kabupaten/kota. Sebaiknya dari pusat/dari provinsi memberikan jeda waktu yang jelas agar kabupaten/kota juga dapat mengajukan rencana pembangunan pariwisata daerah masing-masing.
3. Agar terimplementasinya destinasi pariwisata di Sumatera Selatan yang berkelanjutan, sebaiknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memberikan sosialisasi tentang destinasi percontohan yang berhasil mendapatkan *Sustainable Tourism Certificate* (STC) dari Kementerian Pariwisata Indonesia kepada pengelola dan masyarakat sekitar destinasi
4. Langkah-langkah yang dilakukan untuk program yang telah dibuat sebaiknya dilakukan secara intens sampai terbentuknya destinasi pariwisata berkelanjutan di Sumatera Selatan yang dapat menjadi destinasi percontohan. Saran konsep destinasi pariwisata berkelanjutan bisa dengan menggunakan konsep seperti pada gambar 4.4.